

LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH

2024

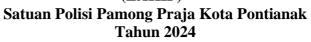
Jl. Zainuddin No. 36 Kec. Pontianak

Kota Kota Pontianak

Telp: (0561) - 731202 Email: polpp.ptk@gmail.com









#### **DAFTAR ISI**

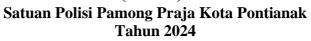
#### KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	3
2. Susunan Organisasi	3
3. Tupoksi	3
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	10
5. Sumber Daya Keuangan	11
6. Sarana dan Prasarana	12
B. PERMASALAHAN UTAMA (STATEGIC ISSUED)	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	
A. RENSTRA	15
1. Visi	16
2. Misi	17
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama	17
B. PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
I. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU I)	24
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	24
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja	
Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun terakhir	36
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Target	
Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	,
organisasi	
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional	
(jika ada)	
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/	- '
2. Imanoa i onjoodo isooomashan isogagaan ada i omigsadan	

Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan ..........38









11. Pengukuran indikator Kinerja Otama (IKO II)41
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 202441
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja
Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun terakhir50
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Target
Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi50
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional
(jika ada)51
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/
Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan51
B. REALISASI ANGGARAN53

BAB IV: PENUTUP

LAMPIRAN







#### KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan adanya penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya mengenai Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang ada sehingga parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dapat lebih terukur dan terarah untuk mencapai outcome yang diharapkan. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan ketertiban dan keamanan untuk mendukung Pemerintah Kota Pontianak dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kota Pontianak.

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Pontianak,3 Januari 2025 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pontianak,

Drs. Ahmad Sudiyantoro Pembina Tingkat I

↑ NIP. 19690312 199703 1 009







#### BAB I PENDAHULUAN

#### A. GAMBARAN UMUM

#### 1. Pendahuluan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pontianak Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kedudukan, tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja sudah lengkap tertulis dalam peraturan tersebut.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 255, 257 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana pasal 255 (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yaitu:

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat,
 aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau
 Perkada;





**Tahun 2024** 



- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Adapun Pasal 257 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut kedudukan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021. Dengan perubahan Peraturan Daerah tersebut terjadi perubahan susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat khusus dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.





#### Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024



#### 2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak terdiri dari:

- 1. Kepala Satuan
- 2. Sekretaris
  - a. Kasubbag Umum dan Aparatur
  - b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- 3. Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum
  - a. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
  - b. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 4. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah
  - a. Kepala Penyelidikan dan Penyidikan
  - b. Kepala Pembinaan dan Penyuluhan
- 5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
  - a. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  - b. Kepala Seksi Peralatan dan Pemadam Kebakaran
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Adapun Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dapat dilihat pada lampiran 1.

#### 3. Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 122 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Satpolpp memiliki tugas pokok dalam membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mempunyai fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 2. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;





#### Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024



- 4. Pelaksanaan administrasi satuan polisi pamong praja; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

#### a) Tugas Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Satuan mempunyai fungsi:

- 1. Perumusaan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 2. Perumusan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 3. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 4. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan;
- 6. Pelaksanaan tugas lain ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Walikota;

#### b) Tugas Sekretaris Satuan

Tugas Sekretaris Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1. Perumusan Kebijakan dibidang kesekretariatan;
- 2. Perumusan Program Kerja dibidang kesekretariatan;
- 3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- 4. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
- 5. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
- 6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
- 7. Pengelolaan adiministrasi kesekretariatan; dan





#### Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024



8. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan Kepala Satuan.

#### c) Tugas Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur

Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kasubbag Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan aparatur;
- 2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan aparatur berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan aparatur;
- 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan aparatur; dan
- 5. Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan aparatur yang diberikan oleh Sekretaris Satuan.

#### d) Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubbag Perencanaan berfungsi:

- 1. Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
- 2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- 3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
- 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
- 5. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

#### e) Tugas Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum

Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang operasi dan ketertiban umum.





**Tahun 2024** 



Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala bidang Operasi dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang operasi dan ketertiban umum;
- 2. Perumusan program kerja dibidang operasi dan ketertiban umum;
- 3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang operasi dan ketertiban umum;
- 4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang operasi dan ketertiban umum;
- 5. Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang operasi dan ketertiban umum;
- 6. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang operasi dan ketertiban umum;
- 7. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang operasi dan ketertiban umum;
- 8. Pengelolaan administrasi dibidang operasi dan ketertiban umum;
- 9. Pelaksanaan fungsi lain dibidang operasi dan ketertiban umum

#### f) Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanaakan kegiatan dan menyusun Laporan dibidang Operasi dan Pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- 1. Penyususnan rencana kerja dibidang operasi dan pengendalian;
- 2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang operasi dan pengendalian;
- 3. Penyususnan bahan laporan pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian;
- 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang operasi dan pengendalian;
- 5. Pelaksanaan tugas lain dibidang operasi dan pengendalian.

#### g) Tugas Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

 Penyusunan rencana kerja dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;





**Tahun 2024** 



- Penyelenggaraan kegiatan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 5. Pelaksanaan tugas lain dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

#### h) Tugas Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang penegakan perundang-undangan daerah:
- 2. Perumusan program kerja dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
- 3. Penyelenggaraan Koordinasi pelaksanaan tugas dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
- 4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
- 5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
- 6. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang penegakan perundangundangan daerah;
- 7. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
- 8. Pengelolaan administrasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah;dan
- 9. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pelayanan perizinan yang diberikan oleh Kepala Satuan;





#### Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024



#### i) Tugas Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Penyelidikan dan Penyidikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan rencana kerja dibidang penyelidikan dan penyidikan;
- 2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang penyelidikan dan penyidikan;
- 3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan;
- 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang penyelidikan dan penyidikan; dan
- 5. Pelaksanaan tugas lain dibidang penyelidikan dan penyidikan.

#### j) Tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan diseksi Pembinaan dan Penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan dan penyuluhan;
- 2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan dan penyuluhan;
- 3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan penyuluhan;
- 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan penyuluhan;
- 5. Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan dan penyuluhan.

#### k) Tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pelayanan Non Perizinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat;
- 2. Perumusan program kerja dibidang perlindungan masyarakat;





#### Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024



- Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat;
- 4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang perlindungan masyarakat;
- 5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat;
- 6. Pembinaan dan Pengendalian teknis dibidang perlindungan masyarakat;
- 7. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat;
- 8. Pengelolaan administrasi dibidang perlindungan masyarakat;
- 9. Pelaksanaan fungsi lain dibidang perlindungan masyarakat yang diberikan Kepala Dinas.

#### 1) Tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kegiatan dan menyusunan laporan dibidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan rencana kerja dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- 5. Pelaksanaan tugas lain dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

#### m) Tugas Kepala Seksi Peralatan dan Pemadam Kebakaran

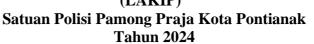
Kepala Seksi Peralatan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan kegiatan dan menyusunan laporan dibidang peralatan dan pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Peralatan dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi:

- 1. Penyusunan rencana kerja dibidang peralatan dan pemadam kebakaran;
- 2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang peralatan dan pemadam kebakaran;
- 3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas peralatan dan pemadam kebakaran:
- 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang peralatan dan pemadam kebakaran; dan









5. Pelaksanaan tugas lain dibidang peralatan dan pemadam kebakaran.

#### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jumlah pegawai dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sampai dengan akhir tahun 2024 berjumlah 92 orang PNS. Sedangkan pejabat struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak berjumlah 12 orang terdiri dari 1 orang eselon II, 4 orang eselon III dan 7 orang eselon IV. Berikut ini adalah gambaran komposisi pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada tabel berikut:

Tabel I.1 Perkembangan Jumlah Pegawai Satpol PP Kota Pontianak Tahun 2020–2024

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1.	Tahun 2020	111 Orang	
2.	Tahun 2021	102 Orang	
3.	Tahun 2022	98 Orang	
4.	Tahun 2023	94 Orang	
5.	Tahun 2024	92 Orang	

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

Tabel I.2 Perkembangan Jumlah Pegawai Satpol PP Kota Pontianak Berdasarkan Golongan Tahun 2020 – 2024

No	Gol.	Gol. Tahun						
140	Kepangkatan	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	Golongan IV	5	3	3	4	7		
2.	Golongan III	48	50	61	66	62		
3.	Golongan II	55	46	31	22	22		
4.	Golongan I	3	3	3	2	1		
	Jumlah	111	102	98	94	92		

Sumber : Satpol PP Kota Pontianak





#### Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024



#### Tabel I.3 Perkembangan Pegawai Satpol PP Kota Pontianak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020 – 2024

No	Jenjang		Ket				
No	Pendidikan	Pendidikan   2020   2021   2022   20		2023	2023 2024		
1.	Tamatan S-2	5	5	6	5	5	
2.	Tamatan S-1	39	37	36	35	38	
3.	Tamatan D-III	2	1	1	1	1	
4.	Tamatan SLTA	62	51	54	49	45	
5.	Tamatan SLTP	1	6	0	3	3	
6.	Tamatan SD	2	2	1	1	0	·
	Jumlah	111	102	98	94	92	

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

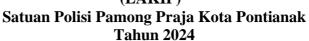
Berdasarkan data kepegawaian diketahui bahwa jumlah Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada tahun 2024 keseluruhan berjumlah 92 orang, dengan jumlah tersebut tidak mencukupi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, memperhatikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak memiliki tugas untuk menjamin dan memastikan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Perda dan Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya sehingga pada saat di lapangan sangat rawan dan rentan terjadi perselisihan kepada warga. Jika dilihat dari formasi pegawai dapat diketahui bahwa Satpol PP Kota Pontianak untuk menjalankan tugas dan fungsinya masih memerlukan tambahan pegawai, untuk meminimalisir kekurangan pegawai tersebut maka dibantu dengan tambahan pegawai honorer, dengan harapan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan dengan maksimal.

#### 5. Sumber Dana Keuangan

Dana yang telah tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak selama tahun 2024 bersumber dari APBD Kota Pontianak. Penganggaran dana untuk kegiatan langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak telah mengacu kepada Kemendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu melalui Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu melalui Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dapat dimanfaatkan dalam penyusunan Anggaran (RKA-









SKPD) Dana APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 20.229.107.517,-** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.4 Anggaran Belanja Operasi Tahun 2020 – 2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Pagu	18.936.272.815,-	18.301.957.415,-	18.094.740.296,-	20.248.212.275,-
Realisasi	18.449.138.405,-	17.800.842.827,-	17.853.564.172,-	19.229.107.517,-
%	97,43	97,26	98,67	94,97

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

Berdasarkan tabel 1.4 diatas, diketahui bahwa anggaran belanja operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024 lebih besar dari Tahun 2023, dengan perbandingan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 18.094.740.296,- dan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 20.248.212.275,- yaitu lebih besar Rp. 1.019.105.233,- atau 5,03 % sedangkan untuk realisasi anggaran tahun 2024 mengalami penurunan 3,7 % dari tahun 2023.

#### 6. Sarana dan Prasarana

#### a. Gedung Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak beralamat di Jalan Zainuddin Nomor 36, yang berada didalam Komplek Kantor Walikota Pontianak.

#### b. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga ketersediaan sarana dan prasarana sebagai unsur penting pendukung kinerja anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Pontianak. Untuk itu, berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Pontianak dirinci sebagaimana tabel berikut :

No	Nama/Jenis Aset	Jumlah Barang
1.	Electric Generating Set	1
2.	Kendaraan Bermotor Penumpang	2
3.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	13





#### Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024



No	Nama/Jenis Aset	Jumlah
4	77 1 D 171	Barang
4.	Kendaraan Bermotor Khusus	4
5.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21
6.	Perkakas Kontruksi Logam Terpasang pada Pondasi	2
7.	Perkakas Bengkel Kayu	2
8.	Perkakas Bengkel Kerja	1
9.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1
10.	Mesin Tik	1
11.	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	20
12.	Alat Kantor Lainnya	8
13.	Meubilair	131
14.	Alat Pengukur Waktu	4
15.	Alat Pendingin	29
16.	Alat Rumah Tanggan Lainnya (Home Use)	28
17.	Alat Pemadam Kebakaran	271
18.	Personal Komputer	52
19.	Peralatan Mini Komputer	17
20.	Peralatan Personal Komputer	14
21.	Meja Kerja Pejabat	71
22.	Meja Rapat Pejabat	1
23.	Kursi Kerja Pejabat	54
24.	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	8
25.	Lemari dan Arsip Pejabat	5
26.	Peralatan Studio Visual	10
27.	Alat Komunikasi Telephone	107
28.	Peralatan Pemancar MF/MW	1
29.	Peralatan Antena VHF/FM	2
30.	Alat Kedokteran Umum	4
31.	Senjata Gemgam	4
32.	Non Senjata Api	15
33.	Bangunan Gedung Kantor	1
34.	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1
35.	Rumah Negara Golongan II	4
36.	Bangunan Pengambilan Irigasi	1
37	Ilmum	9

#### B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Kota Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa tentu tidak terlepas dari keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang akan berpengaruh terhadap ketertiban umum di wilayah Kota Pontianak. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat Kota Pontianak terkait ketertiban umum menimbulkan permasalahan yang kompleks bagi Pemerintah Kota Pontianak. Banyaknya jenis usaha masyarakat Kota Pontianak yang sebagian besar tergolong usaha kecil menengah dan banyaknya penyalahgunaan fasum dan fasos mesti disikapi dengan inovatif demi terwujudnya ketertiban umum di wilayah Kota Pontianak.







Maraknya penyakit masyarakat dan tingginya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada di Kota Pontianak saat ini menimbulkan keresahan masyarakat Kota Pontianak. Banyaknya laporan masyarakat mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (SATPOL PP) untuk terus berbenah, kreatif dan meningkatkan profesionalisme sebagai penegak Perda dan Perkada maupun sebagai pelayan publik kepada masyarakat.

Tingginya mobilitas penduduk dan kurangnya pemahaman terhadap ketertiban umum serta desakan kebutuhan ekonomi diperkotaan membuat masyarakat terpaksa berjualan ditempat yang dilarang. Disisi lainnya Pemerintah Kota Pontianak harus mengambil tindakan tegas untuk mewujudkan kondisi kota yang tertib, bersih dan indah. Mengingat pihak yang ditertibkan sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah pastinya rawan dan berpotensi terjadinya gesekan/bentrokan serta kemacetan. Terbatasnya jumlah personil anggota SATPOL PP Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas seringkali menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang nyata dan bahkan beresiko terhadap keselamatan anggota. Untuk itu dalam meningkatkan kinerja dan meminimalisir resiko, SATPOL PP Kota Pontianak terus melakukan pendekatan strategis.







#### BAB II PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Seiring dengan perkembangan hidup masyarakat yang dinamis secara langsung memberikan dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Perkembangan regulasi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta merta pula membawa perubahan terhadap perencanaan pembangunan di Kota Pontianak. Rencana pembangunan yang dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2020-2024 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis yang diuraikan pada bab ini adalah Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang terdiri 7 (tujuh) komponen yaitu: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Kebijakan dan Program serta Penanggungjawab Program.







#### 1. Visi Kota Pontianak

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai organisasi pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan. Upaya ini perlu terus menerus dikembangkan dengan tetap mencari peluang sebesar-besarnya serta melakukan inovasi dalam bidang pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Oleh sebab itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak perlu menerapkan Manajemen Strategis sebagai langkah awal dalam menentukan strategi ke depan tentang apa yang akan dilaksanakan. Dengan demikian tolak ukur dalam menilai kinerjanya dapat dievaluasi semaksimal mungkin dan obyektif. Untuk itu setiap instansi, terlebih Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai pengampuh Visi dan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih perlu memiliki suatu Tujuan dan Sasaran, sehingga lebih memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang diinginkan oleh instansi dimaksud.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah:







#### "Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025".

#### 2. Misi Kota Pontianak

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut:

Misi Pertama	Mewujudkan masyarakat berwawasan
	kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan
	berahlak mulia
Misi Kedua	Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan
	wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa
	yang berwawasan lingkungan
Misi Ketiga	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
	(Good Governance), masyarakat yang paham
	politik, taat hukum, tentram dan tertib
Misi Keempat	Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi,
	berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan
	terjamin hak-hak warga
Misi Kelima	Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh
	dan merata berbasis ekonomi kerakyatan

#### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah :

- 1. Meningkatkan Kualitas Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
- 2. Meningkatkan Kualitas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.

Sasaran strategis beserta indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah :

- Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat
   Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:
  - a) Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan





**Tahun 2024** 



Hukum Perda dan Perkada

Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan stategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sasaran dan program kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat
   Strategi 1 : Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada
   Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
   Kegiatan yang ditempuh untuk melaksanakan program ini yaitu :
  - I.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan nya yaitu:
    - a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui
       Deteksi Dini Cegah
    - b. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
       Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan
       Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
    - c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - d. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
    - e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia







- I.2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan Sub Kegiatan nya yaitu:
  - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
  - b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan
     Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
  - c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Strategi 1 : Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kegiatan yang ditempuh untuk melaksanakan program ini yaitu :

- II.1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan nya yaitu:
  - a. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
  - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- I.3 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan Sub Kegiatan nya yaitu:
  - a. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

#### B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam Pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan







demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Pontianak sebagai pemberi amanah kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota Pontianak sebagai pemberi amanah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahuntahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2024 telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Walikota Pontianak, berdasarkan Perjanjian Kinerja bulan Januari tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terlampir pada laporan ini.

Perjanjian dan rencana kinerja tahunan 2024 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan OPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran perprogram/kegiatan.





**Tahun 2024** 



Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mewujudkan sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

 Sasaran : Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama yaitu :

#### Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

Indikator Kinerja Utama ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (*output*) serta anggaran sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp. 1.462.160.000,-
  - b) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Anggaran yang di alokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp. 507.035.326,-

Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini berjumlah Rp. 1.969.195.326,-

2. Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu :

#### Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Indikator Kinerja Utama ini dicapai melalui pelaksanaan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan dengan masing-masing indikator kinerja kegiatan (*output*) serta anggaran sebagai berikut:

- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
  - a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Anggaran dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp. 284.185.100,-
  - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.
     Anggaran dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan ini berjumlah Rp. 78.200.000-,







Total anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ini berjumlah Rp. 362.385.100,-







#### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Kota Pontianak ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 78/BAPPEDA/Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pontianak Nomor 535/BAPPEDA/Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Pontianak tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

- 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;







1. SARASAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KETERTIBAN DI KALANGAN

MASYARAKAT

OPD PENGAMPU : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan	100 %	100 %
	Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada		

#### 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 yaitu Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat yang tercermin dengan capaian Indikator dari Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.1 Capaian Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya	Persentase	100 %	100 %	100 %
	Ketertiban di	Penduduk			
	Kalangan Masyarakat	yang			
		Memperoleh			
		Layanan			
		Akibat dari			
		Penegakan			
		Hukum Perda			
		dan Perkada			

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

Dari tabel III.1 pada capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, untuk indikator kinerja utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut ini :

 Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

Pada tahun 2024 Indikator Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada realisasinya sebesar 100 %, nilai realisasi ini menunjukkan berada pada kategori sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama dikategorikan *Sangat Berhasil*.





**Tahun 2024** 

Adapun Program yang mendukung capaian Indikator Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada adalah:

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan.

Kegiatan yang ditempuh untuk melaksanakan program ini yaitu :

- I.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sub kegiatan nya yaitu:
  - Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Cegah. Pada sub kegiatan ini terdapat 3 indikator kinerja yaitu:
    - > Jumlah Patroli Harian 6 Kecamatan dengan target kinerja 360 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 360 laporan giat. Sangat Berhasil.
    - > Jumlah Pengamanan Hari Besar Keagamaan dengan target kinerja 50 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 50 laporan giat. Sangat Berhasil.
    - > Jumlah Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak dengan target kinerja 144 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 144 laporan giat. Sangat Berhasil.
  - Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:
    - > Jumlah Giat Penertiban Lapak dan Gerobak serta Bangunan Liar Pagi dan Sore dengan target kinerja 192 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 192 laporan giat. Sangat Berhasil.







- c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:
  - ➤ Jumlah Rapat Pembinaan Peran Linmas Perkecamatan dengan target kinerja 2 laporan rapat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 2 laporan rapat. *Sangat Berhasil*.
- d. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:
  - Jumlah Patroli bersama Garnizun dengan target kinerja 360 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 360 laporan giat. <u>Sangat Berhasil.</u>
- I.2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Walikota. Sub kegiatan nya yaitu:
  - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:
    - ➤ Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap Masyarakat dengan target kinerja 1 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 1 laporan giat. *Sangat Berhasil*.
  - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan
     Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:
    - ➤ Jumlah Razia Kawasan Tanpa Asap Rokok dengan target kinerja 48 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 48 laporan giat. <u>Sangat Berhasil.</u>
  - c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:







- Jumlah Kegiatan SiCepoy dengan target kinerja 96 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 96 laporan giat. <u>Sangat Berhasil.</u>
- ➤ Jumlah Kegiatan Razia Tempat Hiburan Malam, Cafe dan Sejenisnya dengan target kinerja 16 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 16 laporan giat. *Sangat Berhasil*.
- Jumlah Kegiatan Razia Layangan dengan target kinerja 16 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 16 laporan giat. <u>Sangat Berhasil.</u>
- ➤ Jumlah Kegiatan Razia Gepeng, Anjal dll dengan target kinerja 16 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 16 laporan giat. <u>Sangat Berhasil.</u>

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan Peraturan Daerah, Perda dan Perkada. Pada prinsipnya penegakan Perda dan Perkada merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan Perda dan Perkada adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran Perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan mengutamakan tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun







2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Namun apabila pelanggaran terhadap Perda mengandung unsur pidana maka PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Satpol PP dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (tindakan yustisial).

Tabel III.2 Rekapitulasi Jumlah Pelanggar Perda/Perkada Yang Ditindak Lanjuti Berdasarkan Laporan Masyarakat dan/ Pantauan di Lapangan Tahun 2024

							Bul	an						Jumlah
No	Jenis Pelanggaran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Kasus Pertahun
1	Pasangan Tidak Sah/Asusila	85	73	60	39	40	58	50	9	55	30	15	10	524
2	Pasangan Tidak Sah/Asusila	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Pemilik Usaha Kost/Penginapan/Hotel yang membiarkan terjadinya Perbuatan Asusila	10	3	7	4	5	5	5	6	8	5	2	4	64
4	Menebang Pohon Tanpa Izin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
5	Penumpukan Bahan Material /Pasir Tanah berceceran di Jalan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
6	Koordinator Mengumpulkan Sumbangan Tanpa Izin	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
7	Mengumpulkan Sumbangan Tanpa Izin	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
8	Cafe Menjual Minol	1	5	3	0	0	1	1	0	1	1	0	0	13
9	Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	13	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12	26
10	PKL yang Menumpuk, Meletakkan Barang, Mendirikan Kios/Tenda pada Badan Jalan/Fasum	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11	Membuang Sampah Tidak pada Waktunya	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
	Jumlah	112	81	71	43	48	66	58	15	64	36	18	29	641

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

Pada tabel III.2 dimana pada tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak telah melaksanakan Operasi Pro Yustisi dan menyelesaikan 641 kasus pelanggaran Perda dan/atau Perkada melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (tindakan yustisial). Adapun jumlah tersebut mengalami penurunan







dari tahun sebelumnya (2023), dimana pada tahun 2023 jumlah tindakan yustisial yang dilaksanakan adalah sebanyak 1.087 kasus.

Selanjutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak saat ini memiliki 12 (dua belas) orang PPNS. Untuk mewujudkan Kota Pontianak yang tertib dan tentram, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak juga terus menggalakkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait (Polri dan TNI) salah satu diantaranya melalui kegiatan patroli bersama Garnisun yang dilaksanakan selama 12 bulan. Kemudian dalam rangka pengendalian gangguan tibum linmas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak memantau wilayah Kota Pontianak melalui kegiatan patroli. Patroli dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak di seluruh wilayah Kota Pontianak sebanyak 3 (tiga) x 24 jam /hari. Kegiatan Patroli tersebut mencakup pada pengamanan aset daerah diantaranya pengawasan dan pengamanan dikawasan water front city Kota Pontianak.

Tabel III.3 Data Pejabat PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024

No	Nama/NIP/Pangkat/Gol	No Sertifikat PPNS	OPD	Instansi Pemerintah
1.	Drs. Ahmad Sudiyantoro	SER/065/VII/DIK.2.6./2024	Satpol PP Kota	Kota Pontianak
	NIP. 19690312 199703 1 009		Pontianak	
	Pembina Tingkat I (IV/b)			
2.	Heri Suwito, SH	SER/18/VI/2013	Satpol PP Kota	Kota Pontianak
	NIP. 19801012 201001 1 012		Pontianak	
	Pembina (IV/a)			
3.	M. Tugo S. Sos	SPRIN/343/X/2001	Satpol PP Kota	Kota Pontianak
	NIP. 19680829 199603 1 007		Pontianak	
	Pembina (IV/a)			
4.	Nurhozin, S.Sos	SER/114/VI/2014	Satpol PP Kota	Kota Pontianak
	NIP. 19760505 200701 1 024		Pontianak	
	Pembina (IV/a)			
5.	Hadriyanto, SH	SER/10/VI/2013	Satpol PP Kota	Kota Pontianak
	NIP. 19760111 200604 1 009		Pontianak	
	Penata Tingkat I / III d			
6.	Bahtiar, S.Sos	SER/007/IV/2015	Satpol PP Kota	Kota Pontianak
	NIP. 19690102 200701 1 027		Pontianak	
	Penata Tingkat I / III d			
7.	Rita Marlita, SH	SER/214/IX/2015	Satpol PP Kota	Kota Pontianak
	NIP. 19760314 201001 2 002		Pontianak	
	Penata Tingkat I / III d			
8.	Saifullah, SH	SER/390/XII/2019	Satpol PP Kota	Kota Pontianak
	NIP. 19760606 200701 1 028		Pontianak	
	Penata Tingkat I (III/d)			







9.	Mega Tri Suseno, S.Sos	SER/018/IV/2015	Satpol PP Kota	Kota Pontianak
	NIP. 19730310 2007001 1 023		Pontianak	
	Penata / III c			
10.	Wafid Sudarsono, SE	SER/205/IX/2019	Satpol PP Kota	Kota Pontianak
	NIP. 19691228 200604 1 005		Pontianak	
	Penata / III c	1		
11.	Wibisono Tantrianto, S.H	SER/060/IV/DIK.2.6./2023	Satpol PP Kota	Kota Pontianak
	NIP. 19850501 201001 1 007		Pontianak	
	Penata / III c			
12.	Salaman, SH	SER/053/IV/DIK.2.6./2023	Satpol PP Kota	Kota Pontianak
	NIP. 19790915 200801 1 013		Pontianak	
	Penata Muda Tingkat I (III/b)			

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

#### a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Tabel III.4
Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	DD OCD AM		ANGO	0/	CAPAIAN	TINGKAT		
NO	STRATEGIS	Pr	PROGRAM		TARGET	REALISASI	%	KINERJA	EFISIENSI
1	Meningkatnya	Program	:	Peningkatan	1.969.195.326,00	1.837.950.200,00	93,34	100 %	6,66 %
	Ketertiban Di			Ketentraman					
	Kalangan			dan					
	Masyarakat			Ketertiban					
				Umum					

Dari tabel III.4 diuraikan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

 Persentase Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

Untuk meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada sudah dilakukan beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan sudah diintegrasikan, artinya setiap upaya yang dilakukan mengatasi masalah yang terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP. Hal ini merupakan salah satu upaya efisiensi penggunaan anggaran.

Sumber pembiayaan kegiatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi anggaran belanja pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Bidang Operasi dan Ketertiban Umum pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp. 1.837.950.200,00,- atau 93,34 % dari pagu Rp. 1.969.195.326,00,-. Terdapat Efisiensi dari Anggaran yang





## **Tahun 2024**



sudah dialokasi untuk kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dan Bidang Operasi dan Ketertiban Umum yaitu sebesar Rp. 131.245.126,- (6,66%).

#### b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja.

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak adalah untuk Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada, dan Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak **Tahun 2024** 

No	Sasaran Startegis	Program/ Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Analisa Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/Berhasil
1.	Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat	Program terdiri dari :  1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
		a. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.  Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				







	Melalui Deteksi				
	Dini Cegah.  Capain Indikator				
	Kinerja Program:		222		
	Terlaksananya Jumlah Patroli Harian 6 Kecamatan	360 Laporan Giat	360 Laporan Giat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
*	Terlaksananya Jumlah Pengamanan Hari Besar Keagamaan	50 Laporan Giat	50 Laporan Giat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
*	Terlaksananya Jumlah Pengamanan Hari Besar Keagamaan	144 Laporan Giat	144 Laporan Giat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
	Sub Kegiatan     Penindakan Atas     Gangguan     Ketentraman dan     Ketertiban Umum     Berdasarkan     Perda dan     Perkada melalui     Penertiban dan     Penanganan     Unjuk Rasa dan     Kerusuhan     Massa.  Capain Indikator				
~	Kinerja Program:  Terlaksananya Jumlah Giat Penertiban Lapak dan Gerobak serta Bangunan Liar Pagi dan Sore	192 Laporan Giat	192 Laporan Giat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".







		1	T	
Sub Kegiatan     Pemberdayaan     Perlindungan     Masyarakat     dalam rangka     Ketentraman dan     Ketertiban Umum      Capain Indikator Kinerja     Program:     ✓ Terlaksananya Rapat     Pembinaan Peran     Linmas Perkecamatan	3 Laporan	3 Laporan Rapat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
Sub     Kegiatan     Kerjasama     antar     Lembaga     dan     Kemitraan     dalam     Teknik     Pencegahan     dan     Penanganan     Gangguan     Ketentraman     dan     Ketertiban     Umum      Capain Indikator     Kinerja Program:  ✓ Terlaksananya Jumlah     Patroli bersama     Garnizun        Garnizun  ✓ Terlaksananya Jumlah     Patroli bersama     Garnizun  ✓ Terlaksananya Jumlah     Patroli bersama     Garnizun  ✓ Terlaksananya Jumlah     Patroli bersama     Garnizun		360 Laporan Giat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".







Sub     Kegiatan     Peningkatan     Kapasitas     SDM Satuan     Polisi     Pamong     Praja dan     Satuan     Perlindungan     Masyarakat     Termasuk     dalam     Pelaksanaan     Tugas yang     Bernuansa     Hak Asasi     Manusia  Capain Indikator				
Kinerja Program:  ✓ Terlaksananya Koordinasi Peningkatan Kapasitas SDM Satpolpp dan Satlinmas	1 Laporan Rapa	1 Laporan Rapat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
<ul> <li>b. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota.</li> <li>Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</li> <li>Capain Indikator Kinerja Program:</li> <li>Terlaksananya Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap Masyarakat</li> </ul>	1 Laporan Rapat	1 Laporan Rapat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".







1		T .			
	<ul> <li>Sub Kegiatan         Pengawasan         atas Kepatuhan         terhadap         Pelaksanaan         Peraturan         Daerah dan         Peraturan         Bupati/Walikota</li> </ul>				
	Capain Indikator Kinerja Program:				Daeliaasi Indikatar
	<ul> <li>✓ Terlaksananya Jumlah Razia Kawasan Tanpa Asap Rokok'</li> </ul>	48 Laporan Giat	48 Laporan Giat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa
	<ul> <li>Sub Kegiatan         Penanganan         atas         Pelanggaran         Peraturan         Daerah dan         Peraturan         Bupati/Walikota</li> </ul>				capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
	Capain Indikator Kinerja Program:				
	✓ Terlaksananya Jumlah Kegiatan si Cepoy	96 Laporan Giat	96 Laporan Giat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
	✓ Terlaksananya Jumlah Kegiatan Razia Tempat Hiburan Malam, Cafe dan Sejenisnya	16 Laporan Giat	16 Laporan Giat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
	✓ Terlaksananya Jumlah Kegiatan Razia Layangan	16 Laporan Giat	16 Laporan Giat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".







✓ Terlaksananya Jumlah Kegiatan Razia Gepeng, Anjal dll		16 Laporan Giat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
---------------------------------------------------------------	--	-----------------------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022 dan di Tahun 2024. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel III.6 Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada Indikator sebagai berikut :

 Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

Target pada Indikator Kinerja Utama pada Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada tahun 2024 adalah 100 %. Realisasinya di tahun 2022 adalah sebesar 100 %, dan di tahun 2023 tetap sebesar 100 %. Realisasi tersebut sudah mencapai target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran dari tahun 2022 sampai tahun 2024 adalah 100 %.







### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori sangat berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel III.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

		Indikator Kinerja	]	Target		
No Sasaran Stategis		Utama	2022	2023	2024	Renstra 2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

#### Berikut ini Analisis Capaian Kinerja Indikator:

 Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

Untuk indikator ini, target di Tahun 2024 yaitu sebesar 100%, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Tahun 2024 "Sangat Berhasil" dengan pencapaian sebesar 100%.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tidak Mempunyai Standar Nasional.





### Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

#### Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak **Tahun 2024**



#### 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

Tabel III.8 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2024

	Indikator			
No	Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Peningkatan	1.Adanya Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Cegah 2.Adanya Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3.Adanya Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 4.Adanya Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5.Adanya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia 6.Adanya Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 7.Adanya Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota 8.Adanya Kegiatan Penanganan Atas atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Yang sudah berjalan dengan baik dan lancar, tetap dipertahankan serta ditingkatkan

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

Dari Tabel dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut:

Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada





**Tahun 2024** 



Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Tahun 2024 sebesar 100 %, dan sudah mencapai target yang ditentukan.

#### Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- Diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM melalui penambahan anggaran agar diperoleh SDM yang handal dan berdaya guna secara optimal.
- 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja diantaranya dengan penambahan armada kendaraan dinas/operasiaonal.
- 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mengaktifkan linmas di setiap kelurahan.

## Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- 1. Melibatkan personil dari TNI-Polri
- 2. Memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik serta rutin melakukan pemeliharaan..
- 3. Melakukan pendekatan kepada masyarakat baik melalui sosialisasi maupun edukasi.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Kota Pontianak adalah:

- Mengoptimalkan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Cegah
- Meningkatkan Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Mengoptimalkan Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Mengoptimalkan Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Meningkatkan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia





## **Tahun 2024**



- Mengoptimalkan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Meningkatkan Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Meningkatkan Kegiatan Penanganan Atas atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Tabel III.9 Grafik Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada







## **Tahun 2024**



SARASAN STRATEGIS **MENINGKATNYA KAPASITAS DAERAH** 

DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAN

**KEBAKARAN** 

OPD PENGAMPU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan	100 %	100 %
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		

#### 1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024 yaitu Meningkatnya Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran yang tercermin dengan capaian Indikator dari Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.10 Capaian Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dengan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya	Persentase Penduduk	100%	100 %	100 %
	Kapasitas Daerah	yang Memperoleh			
	Dalam	Layanan			
	Penanggulangan	Penyelamatan dan			
	Bencana dan	Evakuasi Korban			
	Kebakaran	Kebakaran			

Dari tabel III.12 pada capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, untuk indikator kinerja utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut ini:

1) Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pada tahun 2024 Indikator Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran realisasinya sebesar 100 %, nilai realisasi ini menunjukkan berada pada kategori sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama dikategorikan Sangat Berhasil.

Adapun Program yang mendukung Capaian Indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran adalah:

a. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran







dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan indikator kinerja Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Dalam Waktu Tanggap.

Kegiatan yang ditempuh untuk melaksanakan program ini yaitu :

- II.1 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu Persentase Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kasus Kebakaran terlayani. Sub kegiatan nya yaitu:
  - a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:
    - ➤ Jumlah Kasus Kebakaran Yang Ditangani Dalam Tingkat Waktu Tanggap (15 Menit) dengan target kinerja 50 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 53 laporan giat. *Sangat Berhasil*.
  - b. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan,
     Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:
    - ➤ Jumlah Pengawasan Proteksi Kebakaran pada Bangunan Tempat Usaha dengan target kinerja 124 tempat usaha. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 124 tempat usaha. *Sangat Berhasil*.
- II.2 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan indikator kinerja yaitu jumlah kecamatan yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya. Sub kegiatan nya yaitu:
  - a. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana.
     Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:
    - ➤ Jumlah Rapat Koordinasi Pasukan Pemadam Api/Relawan dan atau Masyarakat di Kota Pontianak Setiap Tahunnya dengan target 1 giat rapat. Realisasi target kinerja tahun 2024 ini 1 Giat Rapat. Sangat Berhasil.







Dengan diberlakukannya Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka sejak tahun 2017 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak melakukan restrukturisasi OPD dengan penggabungan Pemadam Kebakaran menjadi salah satu urusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Adapun sepanjang tahun 2024 jumlah kasus kebakaran di WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap (15 menit) adalah sebanyak 53 kasus. Jumlah ini mengalami kenaikan 6 kasus jika dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 53 kasus.

#### Tabel III.11 Data Kebakaran Di Kota Pontianak Tahun 2024

NO	TANGGAL	JAM	LOKASI	KECAMATAN	WAKTU TANGGAP
1	10 Januari 2024	03.54 WIB	JL. SIAM GG. KELANTAN 4 RT/RW : 03/06	PONTIANAK SELATAN	6 MENIT
2	13 Januari 2024	05.25 WIB	JL. TANJUNG RAYA 1 KAMPUNG ARAB GG. AS SALAM RT/RW : 01/08	PONTIANAK TIMUR	9 MENIT
3	26 Januari 2024	13.24 WIB	JL. HUSEIN HAMZAH (PABRIK KRATOM)	PONTIANAK BARAT	9 MENIT
4	06 Februari 2024	01.36 WIB	JL. PURNAMA GANG. PURNAMA AGUNG 5 RT/RW : 03/06	PONTIANAK SELATAN	4 MENIT
5	10 Februari 2024	20.35 WIB	JL. PROF. M. YAMIN RUMAH IBADAH FUK TET CHI	PONTIANAK SELATAN	5 MENIT
6	15 Februari 2024	08.48 WIB	JL. CENDANA GANG. CENDANA DALAM	PONTIANAK KOTA	9 MENIT
7	08 Maret 2024	12.42 WIB	JL. HM SUWIGNYO NO. 27	PONTIANAK KOTA	7 MENIT
8	11 Maret 2024	06.33 WIB	JL. IMAM BONJOL GG. PENITI 1	PONTIANAK SELATAN	7 MENIT
9	17 Maret 2024	06.05 WIB	JL. KEBANGKITAN NASIONAL GG. DHARMA PALA	PONTIANAK UTARA	10 MENIT
10	19 Maret 2024	22.55 WIB	JL. TANJUNG RAYA 2 GG. KURNIA SARI	PONTIANAK TIMUR	7 MENIT
11	21 Maret 2024	11.08 WIB	KANTOR BPSDM PROVINSI JL. M. SOHOR	PONTIANAK SELATAN	5 MENIT
12	21 Maret 2024	12.10 WIB	JL. REFORMASI	PONTIANAK TENGGARA	7 MENIT
13	27 Maret 2024	07.47 WIB	SWALAYAN KAISAR JL. GUSTI SITUT MAHMUD NO. 10	PONTIANAK UTARA	15 MENIT
14	10 April 2024	01.15 WIB	JL. TANUNG PURA NO.419-425	PONTIANAK SELATAN	7 MENIT
15	28 April 2024	11.08 WIB	GG. SAMBAS	PONTIANAK SELATAN	8 MENIT







		1		I	I
16	04 Mei 2024	15.26 WIB	PT. KALITIM JL. KHATULISTIWA	PONTIANAK UTARA	15 MENIT
17	04 Mei 2024	16.55 WIB	JL. TANJUNG RAYA 1 GANG. DAMAI	PONTIANAK TIMUR	7 MENIT
18	04 Mei 2024	18.29 WIB	JL. TANJUNG PURA	PONTIANAK KOTA	5 MENIT
19	08 Mei 2024	15.34 WIB	JL. JEND A YANI 1 NO. 30 DINKES KOTA PONTIANAK	PONTIANAK SELATAN	2 MENIT
20	12 Mei 2024	11.07 WIB	JL. KESEHATAN GANG. SWAKARYA 2	PONTIANAK SELATAN	5 MENIT
21	16 Mei 2024	23.50 WIB	JL. PURNAMA 2 GANG. NURUL HASANAH	PONTIANAK SELATAN	5 MENIT
22	04 Juni 2024	11.06 WIB	JL. NAWAWI HASAN GG. PAJAJARAN 4 RT/RW : 02/12	PONTIANAK BARAT	10 MENIT
23	04 Juni 2024	19.30 WIB	JL. TRITURA GG. AS SALAM 3	PONTIANAK TIMUR	10 MENIT
24	05 Juni 2024	17.10 WIB	JL. HRS ARAHMAN GG. BENDAHARA 1	PONTIANAK BARAT	10 MENIT
25	08 Juni 2024	19.34 WIB	KOPI NOMOR DUA JL. PERDANA	PONTIANAK TENGGARA	5 MENIT
26	09 Juni 2024	18.01 WIB	GG. GENERASI JL. GUSTI SITUT MAHMUD	PONTIANAK UTARA	10 MENIT
27	11 Juni 2024	19.30 WIB	GG. MADRASAH JL. PANGLIMA A. RANI	PONTIANAK TIMUR	8 MENIT
28	19 Juni 2024	16.48 WIB	ROASTERIUM JL. SULTAN ABDURRAHMAN	PONTIANAK KOTA	3 MENIT
29	29 Juni 2024	10.55 WIB	JL. PURNAMA AGUNG 7	PONTIANAK SELATAN	5 MENIT
30	02 Juli 2024	17.20 WIB	JL. TANJUNG RAYA 1	PONTIANAK TIMUR	10 MENIT
31	16 Juli 2024	01.30 WIB	JL. HOS COKROAMINOTO	PONTIANAK KOTA	10 MENIT
32	29 Juli 2024	08.30 WIB	JL. KESEHATAN GANG. SUMBER AGUNG 2	PONTIANAK SELATAN	5 MENIT
33	31 Juli 2024	19.15 WIB	JL. SEPAKAT 2 UJUNG KOMPLEK GRAND MANSION	PONTIANAK TENGGARA	10 MENIT
34	22 Agustus 2024	02.50 WIB	JL. TANJUNG RAYA 1, KAMPUNG DALAM BUGIS, GG. KADRIAH	PONTIANAK TIMUR	10 MENIT
35	30 Agustus 2024	12.05 WIB	GG. SUTAN NATSIR NO. 46 JL. KOM YOS SUDARSO	PONTIANAK BARAT	10 MENIT
36	05 September 2024	10.41 WIB	JL. PERDANA KOMP. PERDANA MANDIRI	PONTIANAK TENGGARA	5 MENIT
37	13 September 2024	10.41 WIB	JL. PROF. Dr. HAMKA GG. NILAM 1	PONTIANAK KOTA	5 MENIT
38	02 Oktober 2024	00.10 WIB	JL. GUSTI SITUT MAHMUD	PONTIANAK UTARA	10 MENIT
39	02 Oktober 2024	10.58 WIB	JL. KOM YOS SUDARSO GG. RIDAN RT/RW : 10/06	PONTIANAK BARAT	7 MENIT
40	14 Oktober 2024	06.06 WIB	JL. APEL GG. LANGSAT	PONTIANAK BARAT	10 MENIT
41	17 Oktober 2024	20.25 WIB	JL. PATTIMURA INDAH GG. RAMIN	PONTIANAK KOTA	7 MENIT







42	18 Oktober 2024	12.05 WIB	JL. DANAU SENTARUM	PONTIANAK KOTA	7 MENIT
43	22 Oktober 2024	10.20 WIB	JL. PARIT PANGERAN KOMP. PANGERAN INDAH RT/RW:005/016	PONTIANAK UTARA	10 MENIT
44	28 Oktober 2024	15.15 WIB	JL. JENDRAL URIP GG. H DALI	PONTIANAK KOTA	5 MENIT
45	28 Oktober 2024	17.12 WIB	JL. PARIT DEMANG	PONTIANAK SELATAN	5 MENIT
46	29 Oktober 2024	16.55 WIB	JL. KUTILANG	PONTIANAK KOTA	6 MENIT
47	02 November 2024	00.35 WIB	JL. KEBANGKITAN NASIONAL GG. DARYONO RT/RW:005/028	PONTIANAK UTARA	15 MENIT
48	14 November 2024	23.25 WIB	JL. PROF M.YAMIN	PONTIANAK SELATAN	7 MENIT
49	20 November 2024	21.07 WIB	JL. PARIT PANGERAN DALAM KOMP. GRAND SRIWEDARI	PONTIANAK UTARA	15 MENIT
50	13 Desember 2024	20.21 WIB	JL. BUDI KARYA	PONTIANAK SELATAN	5 MENIT
51	16 Desember 2024	12.50 WIB	JL. PARIT PANGERAN KOMP. PANGERAN EMPAT	PONTIANAK UTARA	10 MENIT
52	20 Desember 2024	20.30 WIB	JL. TANJUNG PURA GG. MARTAPURA	PONTIANAK SELATAN	6 MENIT
53	20 Desember 2024	10.15 WIB	JL. BUDI UTOMO	PONTIANAK UTARA	15 MENIT

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

#### Tabel III.12 Data Pembasmian Sarang Tawon Di Kota Pontianak Tahun 2024

NO	TANGGAL	JAM	LOKASI	JUMLAH KORBAN DI SENGAT TAWON	WAKTU TANGGAP (MENIT)
1	29-JAN-2024	20.49 WIB	ASTRA MOTOR JL. JEND. A. YANI KEL. BENUA MELAYU DARAT KEC. PONTIANAK SELATAN	1	3 MENIT
2	17 April 2024	21.30 WIB	JALAN KS TUBUN, KOMPLEK ANGGREK KEL. AKCAYA KEC. PONTIANAK SELATAN	2	5 MENIT
3	15 Juli 2024	18.41 WIB	KANTOR WALIKOTA PONTIANAK JALAN ZAINUDDIN NO.36, KEL. TENGAH, KECAMATAN PONTIANAK KOTA	0	7 MENIT
4	29 Agustus 2024	20.20 WIB	RSUDSUDARSO, JL. DOKTER SOEDARSO NO.1 KEL. BANGKA BELITUNG LAUT, KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA	0	5 MENIT
5	06 September 2024	19.55 WIB	GG. SAPTA MARGA V KEL. SUNGAI BELIUNG, KECAMATAN PONTIANAK BARAT	0	10 MENIT
6	13 Oktober 2024	20.00 WIB	JALAN KH. AHMAD DAHLAN GG. MADRASAH 2 NO. 131 KEL. SUNGAI BANGKONG, KECAMATAN PONTIANAK KOTA	2	4 MENIT
7	03 Desember 2024	18.20 WIB	JALAN SEPAKAT 1 KEL. BANGKA BELITUNG LAUT KEC. PONTIANAK TENGGARA	0	3 MENIT







8	04 Desember 2024	18.10 WIB	JALAN DANAU SENTARUM KOMP.	0	6 MENIT
			DANAU SENTARUM 1 KEL. SUNGAI		
			BANGKONG KEC. PONTIANAK KOTA		
9	06 Desember 2024	22.10 WIB	JL. 28 OKTOBER DEPAN TOKO FITRAH	0	10 MENIT
			KEL. SIANTAN HULU KEC. PONTIANAK		
			UTARA		
10	12 Desember 2024	19.00 WIB	JL. SETIA BUDI GG. KELANTAN 1 KEL.	0	5 MENIT
			BENUA MELAYU DARAT KEC.		
			PONTIANAK SELATAN		
11	13 Desember 2024	20.30 WIB	JL. DR. WAHIDIN KOMP. BATARA 1	0	8 MENIT
			BLOK FF KEL. SUNGAI JAWI KEC.		
			PONTIANAK KOTA		

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

Selain kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja juga menjalani tugas sebagai pelayanan penyelamatan yaitu pembasmian sarang tawon dan pembersihan tumpahan solar di jalan. Pada tahun 2023 pembasmian sarang tawon telah ditangani sebanyak 11 kejadian. Pelayanan penyelamatan tersebut dilakukan hasil monitoring Petugas Satpol PP dan pengaduan dari masyarakat yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

Tabel III.13 Data Pembersihan Tumpahan Solar di Jalan Di Kota Pontianak Tahun 2024

NO	TANGGAL	JAM	LOKASI	JUMLAH KORBAN JATUH DARI MOTOR	WAKTU TANGGAP (MENIT)
1.	14 FEBRUARI 2024	21.46 WIB	JL. LET. JEND. SUTOYO KEL. PARIT TOKAYA KEC. PONTIANAK SELATAN	2 ORANG	2 MENIT
2.	14 JULI 2024	11.10 WIB	JL. PURNAMA, KEL. AKCAYA KEC. PONTIANAK SELATAN	1 ORANG	2 MENIT

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

Pada tahun 2024, pelayanan penyelamatan pembersihan tumpahan solar ditangani sebanyak 2 kejadian. Pembersihan tumpahan solar ini dilakukan di wilayah Kota Pontianak. Pelayanan pembersihan tumpahan solar juga dilakukan hasil monitoring Petugas Satpol PP dan pengaduan dari masyarakat yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024.

#### a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.







#### Tabel III.14 Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	,	DD	OCDAM	ANGO	GARAN	0/	CAPAIAN	TINGKAT
NO	STRATEGIS		PK	OGRAM	TARGET	REALISASI	%	KINERJA	EFISIENSI
2.	Meningkatnya	Program	:	Pencegahan,	362.385.100,00	359.336.629,00	99,16	100 %	0,84 %
	Kapasitas			Penanggulangan,					
	Daerah dalam			Penyelamatan					
	Penanggulangan			Kebakaran Dan					
	Bencana dan			Penyelamatan					
	Kebakaran			Non Kebakaran					

Dari tabel III.18 diuraikan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

 Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasional kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung dengan pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak. Realisasi Belanja Bidang Perlindungan Masyarakat pada tahun anggaran 2024 mencapai Rp. 359.336.629,00,- atau 99,16 % dari Pagu Rp. 362.385.100,00,- Terdapat Efisiensi dari Anggaran yang sudah dialokasi untuk kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat, yaitu sebesar Rp. 3.048.471,00,- (0.84%).

## b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja.

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak adalah untuk Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Adapun Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel III.18 sebagai berikut:





#### Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024



#### Tabel III.15 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024

No	Sasaran Startegis	Program/ Kegiatan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Analisa Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Gagal/Berhasil
1.	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Program terdiri dari:  1. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran  a. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  • Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				
		Capain Indikator Kinerja Program:  ✓ Jumlah Kasus Kebakaran yang ditangani dalam Waktu Tanggap (15 Menit)	50 Laporan Giat	53 Laporan Giat	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".





Sub Kegiatan				<u> </u>
Standarisasi Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulanga n Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				
Capain Indikator Kinerja Program:				
✓ Jumlah Pengawasan Proteksi Kebakaran pada Bangunan Tempat Usaha	124 Tempat Usaha	124 Tempat Usaha	100%	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".
b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				
Sub Kegiatan     Dukungan     Pemberdayaan     Masyarakat/Rela     wan Pemadam     Kebakaran     Melalui     Penyediaan     Sarana dan     Prasarana				
Capain Indikator Kinerja Program:				
✓ Jumlah Rapat Koordinasi Pasukan Pemadam Api/Relawan dan atau Masyarakat di Kota Pontianak	1 Laporan Rapat	1 Laporan Rapat	100 %	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil".







## Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2024, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa Tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2022 dan di Tahun 2023. Berikut Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel III.16 Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Kinerja Utama, pada Indikator sebagai berikut :

- Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
- 2) Target pada Indikator Kinerja Utama pada Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran tahun 2024 adalah 100%. Realisasi di tahun 2024 adalah sebesar 100%, dan di tahun 2024 tetap sebesar 100%. Realisasi dimaksud sudah mencapai target dengan kategori Sangat Berhasil. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran dari tahun 2021 sampai tahun 2024 adalah 100 %.

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori sangat berhasil. Lebih jelasnya







Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2024 maupun Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

		Indikator Kinerja		Target		
No	Sasaran Stategis	Utama Utama	2022	2023	2024	Renstra 2024
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
1.	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	100 %	100 %	100 %	100 %

#### Sumber: Satpol PP Kota Pontianak

Berikut ini Analisis Capaian Kinerja pada Indikator:

 Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Untuk indikator ini, target di Tahun 2024 yaitu sebesar 100%, dengan Realisasi Indikator Kinerjanya sebesar 100%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Tahun 2024 "Sangat Berhasil" dengan pencapaian sebesar 100%.

#### 4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tidak Mempunyai Standar Nasional.

#### 5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.







#### Tabel III.18 Analisis Penyebab Peningkatan/Penurunan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak serta Alternatif Solusi yang di lakukan di Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Peningkatan/ Penurunan	Penyebab	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase	Peningkatan	1. Adanya Sub Kegiatan Penyelamatan	yang sudah berjalan
	Penduduk yang		dan Evakuasi Korban Kebakaran	dengan baik dan
	Memperoleh		dan Non Kebakaran	lancar, tetap
	Layanan		2. Adanya Sub Kegiatan Standarisasi	dipertahankan serta
	Penyelamatan		Sarana dan Prasarana Pencegahan,	ditingkatkan
	dan Evakuasi		Penanggulangan Kebakaran dan	
	Korban		Alat Pelindung Diri	
	Kebakaran		3. Adanya Sub Kegiatan Dukungan	
			Pemberdayaan Masyarakat/Relawan	
			Pemadam Kebakaran Melalui	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana	
			_	

Dari Tabel dapat disampaikan Analisis Penyebab dan Solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

 Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2024 sebesar 100 %, dan sudah mencapai target yang ditentukan.

#### Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:

- 1. Diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM melalui penambahan anggaran agar diperoleh SDM yang handal dan berdaya guna secara optimal.
- 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja diantaranya dengan penambahan armada kendaraan dinas/operasiaonal.
- 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mengaktifkan linmas di setiap kelurahan.

## Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- 1. Melibatkan personil dari TNI-Polri
- 2. Memanfaatkan sumber daya yang ada dengan baik serta rutin melakukan pemeliharaan..
- 3. Melakukan pendekatan kepada masyarakat baik melalui sosialisasi maupun edukasi.





## **Tahun 2024**



Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dapat Memberikan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran di Kota Pontianak adalah:

- Meningkatkan Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
- Mengoptimalkan Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- Pemberdayaan Mengoptimalkan Sub Kegiatan Dukungan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Tabel III.19 Grafik Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran



#### C. Realisasi Anggaran

Untuk tahun 2024 terdapat target pendapatan baru yaitu pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah yang sebelumnya tercatat di Badan Keuangan Daerah sebagai Lain-Lain PAD yang Sah, sejak tahun 2021 dikembalikan pencatatannya ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Denda atas pelanggaran ini selain mengampuh PERDA dan PERWA yang ada di Kota Pontianak dengan realisasi sebesar Rp. 338.600.095,-







#### Tabel III.20 Realisasi Pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024

Jenis Pendapatan	Realisasi (Rp)
A. Pendapatan Asli Daerah	338.600.095
I.II Lain-Lain PAD yang sah	338.600.095
Pendapatan Denda	338.600.095
atas Pelanggaran Peraturan Daerah	336.000.095

Selanjutnya, adapun realisasi pelaksanaan belanja yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 berdasarkan pada DPA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.21 Data Realisasi Pelaksanaan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	17.916.631.849,00	17.031.820.688,00	95,06
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.359.302.168,00	13.609.911.724,00	94.78
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	420.759.000,00	418.700.000,00	99.51
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	641.050.543,10	582.783.155,00	90.91
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	239.295.600,00	234.200.000,00	97.87
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.703.334.537,90	1.650.053.603,00	96.87
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	552.890.000,00	536.172.206,00	96.98
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.969.195.326,00	1.837.950.200,00	93.34
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.462.160.000,00	1.343.725.200,00	91.90
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	507.035.326,00	494.225.000,00	97.47
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	362.385.100,00	359.336.629,00	99.16
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	284.185.100,00	282.936.629,00	99.56
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	78.200.000,00	76.400.000,00	97.70
	Total	20.248.212.275,00	19.229.107.517,00	94.97

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2024, realisasi pelaksanaan belanja yang terealisasi adalah sebesar 94,97 % dari pagu anggaran yang tersedia, hal ini menunjukkan bahwa rencana kinerja secara garis besar menunjukkan persentase yang sangat berhasil.





#### Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024



### BAB IV PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024 ini, dapat dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tahun 2020 – 2024 untuk mencapai Visi Kota Pontianak yaitu: "Pontianak Kota Khatulistiwa, Berwawasan Lingkungan Yang Cerdas Dan Bermartabat".

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2024 dari sasaran yang ditetapkan dalam rencana kinerja secara garis besar dapat mencapai target. Dari 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) sasaran tersebut termasuk dalam kategori *Sangat Berhasil*.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Sasaran : Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat, dengan indikator sebagai berikut:
  - ➤ Indikator Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada realisasinya berada pada kategori sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama dikategorikan *Sangat Berhasil*...
- Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dengan indikator sebagai berikut :
  - Indikator Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran realisasinya berada pada kategori sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama dikategorikan <u>Sangat Berhasil</u>.

Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam mewujudkan tercapainya 2 (dua) sasaran tersebut didukung 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan. Pembiayaan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut diperoleh dari







dana APBD tahun 2024 sebesar Rp. 2.331.580.426,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.197.286.829,00,- atau 94,97 %. Untuk untuk pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah telah memberikan kontribusi sebesar Rp. 338.600.095,-.

Keberhasilan merealisasikan target-target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tidak terlepas dengan adanya upaya kerja keras Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dalam memenuhi program-program pembangunan pemerintah yang telah direncanakan.

#### B. LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN

- Diperlukan peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM melalui penambahan anggaran agar diperoleh SDM yang handal dan berdaya guna secara optimal.
- 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kinerja diantaranya dengan penambahan armada kendaraan dinas/operasional.
- 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mengaktifkan linmas di setiap kelurahan.

Pontianak, 3 Januari 2025 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

(3) PANON Pedabina Tingkat I 1 NIP 11 1890312 199703 1 009

RINTA Rota Pontianak







#### LAMPIRAN

#### FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**TAHUN ANGGARAN** 

: 2024

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Ketertiban di Kalangan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban	100 %	100 %	100 %

Pontianak, 3 Januari 2025 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pontianak

Drs. Ahmad Sudiyantoro

NIP. 19690312 199703 1 009

